

Tantangan Dinamika Regulasi Sekolah Bertaraf Internasional di Indonesia

Muhammad Abduh*, Muhammad Latif Nawawi², Nyayu Khodijah³,
Abdurahmansyah⁴

¹³⁴Pascasarjana, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

² STIT Bustanul 'Ulum Lampung Tengah, Indonesia

*email. mabduh471@gmail.com

Abstrak

Lanskap regulasi yang dinamis menghadirkan tantangan signifikan bagi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Indonesia, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi standar pendidikan global sambil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan regulasi yang dihadapi oleh SBI dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan dan integrasi budaya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri literatur dan hasil penelitian terkait regulasi dan pelaksanaan program berstandar internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun SBI berupaya menyediakan pendidikan dan fasilitas berkualitas tinggi sesuai dengan standar internasional, mereka sering kali terhambat oleh regulasi yang berfluktuasi dan dukungan keuangan yang tidak memadai. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka regulasi yang konsisten dan mendukung, sumber pendanaan yang berkelanjutan, dan adopsi kurikulum inklusif yang menghormati nilai-nilai budaya lokal. Wawasan ini memberikan implikasi berharga bagi pembuat kebijakan, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan, dengan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas SBI di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, SBI dapat lebih baik memenuhi peran mereka dalam memberikan pendidikan yang kompetitif secara internasional sambil melestarikan warisan budaya Indonesia yang kaya.

Kata kunci : Sekolah Bertaraf Internasional; Tantangan Regulasi; Integrasi Budaya; Kualitas Pendidikan; Indonesia.

Abstract

The dynamic regulatory landscape presents significant challenges for International Standard Schools (SBI) in Indonesia, impacting their ability to meet global educational standards while integrating local cultural values. This study aims to explore the regulatory challenges faced by SBIs and their implications for educational quality and cultural integration. The method used is library research, which involves reviewing relevant literature and studies on regulations and the implementation of international standard programs. The findings reveal that although SBIs strive to provide high-quality education and facilities in line with international standards, they are often hindered by fluctuating regulations and inadequate financial support. Additionally, the study highlights the importance of a consistent and supportive regulatory framework, sustainable funding sources, and the adoption of an inclusive curriculum that respects local cultural values. These insights offer valuable implications for policymakers, educational institutions, and stakeholders, emphasizing the need for collaborative efforts to enhance the stability and effectiveness of SBIs in Indonesia. By addressing these challenges, SBIs can better fulfill their role in providing internationally competitive education while

preserving Indonesia's rich cultural heritage.

Keywords: *International Standard Schools; Regulatory Challenges; Cultural Integration; Quality of Education; Indonesia.*

Diserahkan: 26 Juli 2024, Disetujui: 27 Agustus 2024, Dipublikasikan: 22 September 2024

PENDAHULUAN

Dinamika pendidikan di Indonesia selalu mengalami pasang dan surut, belum menemukan pola yang tepat untuk diterapkan secara merata dan berkesinambungan. Kebijakan pendidikan Indonesia masih terkesan *trial and error*¹. Ada tiga persoalan dasar berkaitan dengan kebijakan pendidikan: pertama, pola perumusan kebijakan pendidikan yang masih berpusat pada elit kekuasaan dengan sistem top-down di satu sisi sementara partisipasi masyarakat relatif masih minimal di sisi lain. Meskipun sekarang ini sudah memasuki era otonomi daerah, namun praktek dengan kultur birokrasi politik lama masih tetap mengemuka. Kedua, banyaknya rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dirancang secara rumit dan mahal ternyata ketika sampai pada tataran implementasi mengalami distorsi dan banyak penyimpangan. Ketiga, berbagai paket kebijakan tentang inovasi pendidikan hampir selalu dilakukan dengan serba cepat (*instant*) dan kurang mempertimbangkan berbagai implikasi secara matang. Akibatnya semua paket kebijakan di atas menjadi sekedar proyek dan terkesan *involutive* semata².

Termasuk dalam hal ini kebijakan tentang sekolah bertaraf internasional. Secara regulasi jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya banyak menimbulkan persoalan-persoalan lain seperti pembiayaan yang dianggap membebani masyarakat dan pengelolaanya belum transparan sehingga pada akhirnya harus dihentikan³. Sebenarnya keberadaan

¹ Wakib Kurniawan, Syarif Maulidin, and Miftahur Rohman, "Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Total Quality Manajemen," *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 8, no. 1 (2024): 36–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/cakrawala.v8i1.1924>.

² Developmental Trajectories et al., "Self- and Externally Regulated Learning in Adolescence Self- and Externally Regulated Learning in Adolescence" 59, no. 7 (2024): 1327–1345., <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/dev0001537>.

³ Hawwin Huda Yana et al., "MODERATED COEXISTENCE: EXPLORING RELIGIOUS TENSIONS THROUGH," *RAUDHAH Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, no. April (2024): 68–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.48094/raudhah.v9i1.605>.

sekolah bertaraf internasional (SBI) dan sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) adalah salah satu upaya untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dengan standar internasional sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini menjadi penting mengingat tuntutan akan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi.

Lahirnya kebijakan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) memiliki alasan antara lain: 1. Di tahun 90 banyak sekolah yang didirikan oleh suatu yayasan dengan menggunakan identitas internasional tetapi tidak memiliki kejelasan kualitas dan standarnya; 2. Banyak orang tua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan anaknya keluar negeri; 3. Belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sekolah internasional; 4. Perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan⁴; 5. Berdasarkan fenomena di atas, pemerintah mulai mengatur dan merintis sekolah bertaraf internasional; 6. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu pengakuan secara internasional terhadap kualitas proses dan hasil pendidikannya. Kemudian, sekolah RSBI mulai dikembangkan oleh pemerintah pada tahun 2005 dengan syarat yang cukup berat bagi sekolah yang ingin mendapatkan status sebagai sekolah RSBI. Tercatat jumlah sekolah RSBI pada tahun 2007 berjumlah 419 sekolah, pada tahun 2009 berjumlah 323 sekolah, dan pada tahun 2011 mengalami lonjakan yang berarti yaitu 1.305 sekolah⁵.

Pada tahun 2012, keberadaan RSBI harus dihentikan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-X/2012 yang menghapus pasal 50 ayat 3 undang-undang system pendidikan nasional sehingga semua sekolah yang berstatus RSBI dikembalikan menjadi sekolah reguler sebagaimana sekolah-sekolah lainnya⁶. Namun demikian, untuk mempertahankan keberadaan sekolah internasional yang

⁴ Wakib Kurniawan et al., "Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (Ctl) Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar Di Mi Lirboyo," *JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam)* 9, no. 1 (2023): 17–26, <https://doi.org/10.54892/jpgmi.v9i1.177>.

⁵ Ziyu Zhou, Steve Graham, and Tien Ping Hsiang, "Teaching Chinese Characters to First and Second Graders during the First Covid-19 School Closure in China: An Observational Study," *Reading and Writing* 36, no. 9 (2023): 2465–98, <https://doi.org/10.1007/s11145-022-10398-9>.

⁶ Jean-Antoine Girault, "Plea for a Simple But Radical Change in Scientific Publication: To Improve Openness, Reliability, and Reproducibility, Let's Deposit and Validate Our Results before Writing Articles," *Eneuro* 9, no. 5 (September 1, 2022): ENEURO.0318-22.2022, <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0318-22.2022>.

sudah ada dan memfasilitasi masyarakat yang ingin mendirikan sekolah internasional, maka pemerintah menerbitkan Permendikbud nomor 31 tahun 2014 yang mengatur keberadaan sekolah internasional dengan prinsip kerjasama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia tanpa memakai label sekolah internasional. Penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional di Indonesia dari aspek regulasi masih mengalami ambiguitas. Di satu sisi secara regulasi tidak lagi mengenal istilah sekolah internasional namun dalam praktik banyak sekolah yang menamakan diri sebagai sekolah internasional. Seperti apa perkembangan sekolah internasional di Indonesia, bagaimana tantangannya, dan apa dampaknya bagi lembaga pendidikan Islam akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri literatur dan hasil penelitian terkait regulasi dan pelaksanaan program sekolah berstandar internasional⁷. Untuk memahami sumber-sumber tersebut, penulis menerapkan pendekatan historis⁸. Pendekatan historis dilakukan dengan meneliti dinamika regulasi yang diterbitkan pemerintah dalam mengelola sekolah berlabel internasional baik RSBI pra Putusan MK maupun SPK Pasca Putusan MK. Sumber data Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari: (1) Permendikbud No. 78 tahun 2009 tentang aturan pelaksanaan program RSBI/SBI; dan (2) Permendikbud No. 31 tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan pendidikan oleh LPA dengan LPI. Data sekunder berasal dari berbagai literatur dan hasil penelitian terkait dengan topik penelitian⁹. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.

⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

⁸ Ifah Rofiqoh and Zulhawati Zulhawati, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran," *Pustaka Pelajar*, no. 1 (2020): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁹ Linda Z Cooper, "Methodology for a Project Examining Cognitive Categories for Library Information in Young Children," *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 53, no. 14 (December 1, 2002): 1223–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/asi.10164>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya dinamika bahkan paradigma dalam memandang regulasi sekolah bertaraf internasional dimana sebelum adanya putusan MK Sekolah internasional merupakan sekolah yang tidak menggunakan kurikulum lokal/nasional, melainkan sepenuhnya menggunakan kurikulum negara lain dalam pelaksanaan pendidikannya. Salah satu kebijakan pemerintah tentang Sekolah bertaraf internasional adalah mendirikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). RSBI didirikan oleh pemerintah untuk mengatasi dan menertibkan fenomena sekolah yang didirikan oleh yayasan dengan identitas internasional, namun tanpa kejelasan kualitas, mutu, dan standar pendidikannya. Selain itu, RSBI juga bertujuan untuk merespon tren banyaknya orang tua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan anaknya di luar negeri, mengingat belum adanya payung hukum yang jelas mengatur penyelenggaraan sekolah internasional di Indonesia, Namun demikian, setelah diaturnya regulasi tentang RSBI, justru mendapat tantangan nyata yaitu persyaratan yang cukup berat bagi sekolah yang ingin mendapatkan status sebagai sekolah RSBI serta munculnya dinamika dan menjadi gejolak dimasyarakat yang berkepanjangan diberbagai kalangan, terutama awal munculnya yang dianggap tidak sesuai dengan amanah UUD 1945 yang mensyaratkan pendidikan untuk semua.

Keberadaan RSBI dikhawatirkan telah memicu kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini bertentangan dengan semangat globalisasi dalam dunia pendidikan, yang tidak hanya tentang prestise internasional, tetapi juga tentang pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat. Permasalahan dan Dinamika regulasi RSBI yang berkepanjangan tersebut yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan RSBI dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Berdasarkan Hukum pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pasca Mahkamah Konstitusi membatalkan program RSBI/SBI di tahun 2014, regulasi sekolah berlabel internasional diubah melalui program Satuan Pendidikan

Kerja Sama (SPK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014. Peraturan ini menjelaskan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI). Hingga saat ini, Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tersebut menjadi pedoman bagi pengelolaan sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Regulasi SPK ini pula ternyata tidak cukup menghentikan dinamika tentang sekolah bertaraf internasional di Indonesia, baik dari sisi adaptasi kurikulum, integrasi budaya, bahasa pengantar, pendanaan serta fasilitas pendidikan dan SDM.

Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi sekolah bertaraf internasional baik pra maupun pasca putusan MK yang mengubah regulasi menjadi SPK mengalami banyak dinamika dan Tantangan dalam penyelenggaraannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya oleh SPK sebagai regulasi yang mengatur tentang sekolah bertaraf internasional di Indonesia adalah menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini agar mampu meredam dan meminimalisir dinamika dan problem yang menjadi beban dalam penyelenggaraan dan pengelolanya.

Perkembangan Sekolah Bertaraf Internasional Pra dan pasca putusan MK

Istilah sekolah internasional dinyatakan sejak Tahun 1975, tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP/817/PD/X/75; Nomor 060/O/1975; dan Nomor Kep-354a/ MK/II/4/1975. Menurut SKB tersebut, Sekolah Internasional adalah sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan oleh suatu yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga Negara asing bukan anggota perwakilan diplomatik/konsuler sesuatu negara lain di Indonesia. Sekolah internasional merupakan sekolah yang tidak menggunakan kurikulum lokal/nasional, melainkan sepenuhnya menggunakan kurikulum negara lain dalam pelaksanaan pendidikannya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Nomor 105/C/KEP/LN/2014, kurikulum asing yang umum digunakan di Indonesia sebagai contoh adalah kurikulum

International Baccalaureate (IB), Cambridge International Examinations (CIE), Western Association Schools and Colleges (WASC), dan lain-lain.

Secara historis keberadaan sekolah internasional di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1925 yaitu *Highlands School Kabanjahe*. Hanya saja sekolah ini murni diperuntukkan bagi para anak dari luar negeri yang orangtuanya bekerja di Indonesia. Selain *Highlands School Kabanjahe*, kemudian muncul beberapa sekolah internasional lainnya khususnya di Jakarta yang didirikan oleh orang asing seperti *Jakarta International School (JIS)* tahun 1951. Sekolah tersebut kemudian tidak hanya mendidik para anak dari luar negeri tetapi juga menerima siswa dari anak Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia memandang perlu dibentuk sekolah bertaraf internasional. Hal ini tertuang dalam undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 yang berbunyi : “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional¹⁰.

Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sebagai berikut: “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Sejak diundangkannya UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pada tahun 2011 tercatat 1.305 jumlah sekolah yang terdaftar sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang pada akhirnya diharapkan menjadi sekolah bertaraf internasional. Namun dalam implementasinya setelah beberapa tahun RSBI dibentuk belum satupun sekolah yang memenuhi standar Internasional. Padahal dalam pelaksanaannya, RSBI ditopang oleh pembiayaan yang sangat besar. Sehingga hal ini memicu kontroversi di masyarakat bahwa sekolah bertaraf internasional hanyalah modus untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang banyak. Karenanya

¹⁰ Rosa Cheesman et al., “A Population-Wide Gene-Environment Interaction Study on How Genes, Schools, and Residential Areas Shape Achievement,” *Npj Science of Learning* 7, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.1038/s41539-022-00145-8>.

penyelenggaraan RSBI melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 pada akhirnya dihentikan.

Putusan MK itu menghapus dasar hukum seluruh sekolah (sekolah negeri dan sekolah swasta) yang berlabel internasional dimana pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD 1945. Sejalan dengan putusan MK tentang penghapusan sekolah-sekolah yang berstatus RSBI, maka semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor: 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang ditandatangani oleh Mendikbud pada tanggal 30 Januari 2013.

Kendati sekolah berlabel internasional telah dihapus melalui putusan MK, pemerintah menerbitkan Permendikbud No. 31 tahun 2014 tentang satuan pendidikan kerjasama (SPK). Permendikbud ini membuka peluang bagi siapa saja yang akan mendirikan sekolah dengan mengacu pada kurikulum negara tertentu dengan prinsip kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antara lembaga pendidikan asing (LPA) dengan lembaga pendidikan Indonesia (LPI) tanpa menggunakan istilah sekolah internasional.

Menurut data terbaru mengutip dari website www.spkindonesia.org mengalami pertumbuhan pesat hingga saat ini sudah ada 437 satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. Indonesia saat ini menempati posisi teratas di Asia Tenggara, dengan jumlah sekolah internasional terbanyak dan berada di posisi 10 global. Fakta tersebut membuat Indonesia menjadi pangsa pasar utama sekolah internasional di Asia Tenggara¹¹. Menyusul Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara dengan jumlah sekolah internasional terbanyak adalah Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Singapura, Filipina, Myanmar, Laos dan Brunei. Jumlah sekolah internasional di Asia Tenggara sendiri

¹¹ Florence Martin et al., "Teacher and School Concerns and Actions on Elementary School Children Digital Safety," *TechTrends* 67, no. 3 (2023): 561–71, <https://doi.org/10.1007/s11528-022-00803-z>.

adalah 1.027, dimana 61 sekolah internasional baru bertambah hanya dalam kurun waktu satu tahun, mulai Januari 2016 sampai Januari 2017.

Tantangan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) di Indonesia.

Sekolah bertaraf internasional di Indonesia telah menjadi topik menarik dalam pendidikan. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dengan standar internasional yang tinggi, menggunakan kurikulum internasional seperti *International Baccalaureate* (IB) atau *Cambridge*. Sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang sekarang dikenal dengan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) merupakan bentuk pendidikan yang berkolaborasi dengan institusi pendidikan internasional untuk menawarkan program pendidikan dengan standar global¹². SPK sering menggunakan kurikulum internasional seperti *International Baccalaureate* (IB) atau *Cambridge*, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Namun, implementasi SPK menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya¹³.

Tantangan dalam Impelementasi Kurikulum

1. Adaptasi Kurikulum

Perkembangan zaman mendorong semakin banyak sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) untuk bersaing dalam mengintegrasikan kurikulum nasional dan mengadaptasi kurikulum dari berbagai negara yang dianggap memiliki standar pendidikan unggul¹⁴. Meskipun dalam persaingan dalam integrasi kurikulum dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga asing, sekolah berstatus SPK tetap wajib menerapkan kurikulum yang sejalan dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum tingkat satuan

¹² Luis Vargas-Montoya, Gregorio Gimenez, and Marcos Fernández-Gutiérrez, "ICT Use for Learning and Students' Outcomes: Does the Country's Development Level Matter?," *Socio-Economic Planning Sciences* 87 (2023): 101550, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101550>.

¹³ Cheesman et al., "A Population-Wide Gene-Environment Interaction Study on How Genes, Schools, and Residential Areas Shape Achievement."

¹⁴ Hawwin Huda Yana and Lilik Susanti, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi Di Madrasah," *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i1.47>.

pendidikan (KTSP) di sekolah ini wajib berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, yang mewajibkan setiap sekolah untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan sekolahnya. Ini menuntut penyesuaian agar kedua kurikulum dapat berjalan seiring tanpa mengurangi kualitas masing-masing ¹⁵.

Sejalan dengan Permedikbud No 31 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 ¹⁶ yang menyatakan bahwa

“Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan dibidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk”.

Regulasi di atas menjelaskan dan mengatur bahwa selain standar kurikulum SPK yang sudah ditetapkan secara Nasional oleh pemerintah, SPK juga diharapkan dapat mengembangkan kurikulum luar negeri sesuai dengan kebutuhan dengan catatan mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ini menunjukkan bahwa SPK harus beradaptasi terhadap kurikulum nasional dengan tantangan terbesarnya kebanyakan adalah tidak terbiasa dengan sistem yang diwajibkan. Misalnya, mengharuskan adanya mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan dimana sebelum menjadi SPK sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum Internasional seperti *International Baccalaureate* (IB) atau *Cambridge*, yang akhirnya menjadi adaptasi baru bagi SPK untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan regulasi yang mengatur.

Sejalan dengan pendapat di atas, Meskipun SPK diproyeksikan menjadi satuan pendidikan berskala global atau internasional, namun jika masih mengacu pada standar nasional pendidikan, hasil pendidikannya pun akan tetap berstandar nasional. Oleh karena itu, SPK diizinkan untuk mengadaptasi kurikulum lain yang berstandar internasional. Namun, SPK tetap wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa

¹⁵ S Rahayu, E Haryanto, and M R Ali, “Manajemen Kurikulum Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Dasar High Scope Indonesia Kota Palembang,” *Educational ...* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/20.21595/elementv99i1.paperID>.

¹⁶ Ulva Hasdiana, “PERMENDIKBUD NOMOR 31 TAHUN 2014,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5.

Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara Indonesia, serta pembelajaran budaya Indonesia bagi warga negara asing.¹⁷ Kebijakan sekolah bertaraf internasional, atau yang sekarang dikenal sebagai sekolah satuan pendidikan kerjasama, merupakan salah satu perkembangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar mampu bersaing dengan negara maju di era global.

Terbitnya Kurikulum merdeka di Indonesia melalui Permendikbudristek No. 5 dan 7 Tahun 2022 yang menjadi kebijakan yang mengatur tentang implementasi kurikulum merdeka (IKM) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dalam adaptasinya SPK juga menjadi penggerak untuk membumikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sesuai dengan yang disampaikan Haifa sebagai Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia (PSSI) bahwa “Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia (PSSI) rutin mengadakan roadshow tahunan untuk memperkuat jaringan antar sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di seluruh Indonesia. Selain memperkuat jaringan, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara pimpinan sekolah SPK dan swasta nasional di beberapa kota besar di Indonesia. Pada tahun 2023, roadshow diadakan di delapan kota, yaitu Bandung, Medan, Tangerang Selatan, Pekanbaru, Makassar, Surabaya, Semarang, dan Bali. Agenda utama roadshow tahun ini adalah untuk menyosialisasikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).¹⁸

Kompetensi Guru

Guru di SPK perlu memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kurikulum internasional dan lokal. Hal ini menuntut rekrutmen guru yang memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan mengajar sesuai standar internasional dan nasional. Sejalan dengan hal itu Poin menarik yang perlu dicermati dari Peraturan tentang SPK adalah ketentuan tentang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Jumlah guru Indonesia di SPK minimal 30 persen dan harus memegang gelar sarjana

¹⁷ Rahayu, Haryanto, and Ali, “Manajemen Kurikulum Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Dasar High Scope Indonesia Kota Palembang.”

¹⁸ Yohanes Enggar Harussusilo, “Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia: Sekolah SPK Ambil Peran Strategis Di Kurikulum Merdeka,” 2023.

yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Sementara untuk tenaga kependidikan, kuota minimum untuk warga negara Indonesia adalah 80 persen.

SPK mewajibkan kepala sekolah minimal bergelar magister (Strata 2). Selain itu, pemerintah melarang ekspatriat menduduki jabatan kepegawaian di sekolah. Aturan ini bertujuan untuk memastikan kepemimpinan dan pengelolaan sekolah yang berkualitas oleh tenaga lokal¹⁹. Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi persentase guru Indonesia minimal 30% diharuskan untuk memulangkan guru asing atau menambah guru Indonesia agar mencapai komposisi ideal. Pelatihan bagi guru juga harus terus ditingkatkan agar mereka dapat mengajar dengan efektif sesuai dengan standar internasional dan tetap relevan dengan konteks lokal adalah tantangan penting. Ini mencakup pelatihan metodologi pengajaran dan pemahaman budaya. Pernyataan juga diperkuat oleh Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia (PSSI) bahwa Kompetensi harus selalu ditingkatkan disampaikan pada kegiatan Membumikan IKM melalui *www. Kompas.com* bahwa Selain agenda utama, kegiatan kunjungan delapan kota ini juga menjadi ajang diskusi mengenai arah kebijakan SPK ke depan serta kegiatan pengimbasan yaitu program peningkatan kompetensi guru sekolah negeri dan swasta di wilayah kunjungan.²⁰

Selain Kompetensi yang harus ditingkatkan, Seorang pendidik yang ideal bagaikan segitiga, dengan tiga sisi yang saling menopang: ilmu, keterampilan, dan etika. Ketiga aspek ini haruslah dimiliki secara seimbang. Menguasai ilmu tanpa kemampuan mentransfernya menjadi keterampilan tidaklah bermanfaat. Memiliki ilmu dan kemampuan mentransfernya, namun tanpa moral dan etika, hanya akan menjadikan individu tersebut sebagai "genius terampil hewani".²¹ Kriteria 'nilai' profesional dan kompeten ini perlu dikedepankan, untuk melengkapi kriteria yang dirumuskan Standar Nasional Pendidikan memiliki empat hal yaitu kemampuan profesional (*professional capacity*), upaya profesional (*professional effort*), waktu yang dicurahkan(*time devotion*), dan imbalan atas hasil kerja

¹⁹ Zhou, Graham, and Hsiang, "Teaching Chinese Characters to First and Second Graders during the First Covid-19 School Closure in China: An Observational Study."

²⁰ Enggar Harussusilo, "Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia: Sekolah SPK Ambil Peran Strategis Di Kurikulum Merdeka."

²¹ Rahayu, Haryanto, and Ali, "Manajemen Kurikulum Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Dasar High Scope Indonesia Kota Palembang."

(*professional welfare*), yang seolah-olah menganggap orang profesional adalah orang yang berpendidikan tinggi, berdasi, dan bergaji tinggi.

Tantangan Infrastruktur dan Fasilitas

1. Fasilitas Pendidikan

Penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung program pendidikan internasional adalah tantangan besar. Ini mencakup laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan standar internasional.

a. Laboratorium

Laboratorium penting dalam pendidikan internasional, terutama untuk sains. Tantangannya meliputi biaya tinggi untuk peralatan dan bahan, pemenuhan standar keamanan yang ketat, dan kualifikasi staf yang memadai untuk mengelola dan melakukan eksperimen.

b. Perpustakaan

Perpustakaan yang memadai merupakan inti pendidikan berkualitas tinggi. Tantangannya termasuk investasi besar untuk koleksi buku dan materi digital, integrasi teknologi seperti katalog digital dan fasilitas e-learning, serta penyediaan ruang yang nyaman untuk membaca dan belajar.

c. Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang canggih adalah keharusan dalam pendidikan internasional. Tantangannya mencakup penyediaan perangkat keras dan lunak yang selalu diperbarui, akses internet cepat dan stabil, serta keamanan siber untuk melindungi data siswa.

d. Fasilitas Lainnya

Selain laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi, fasilitas lain yang penting meliputi ruang kelas dengan teknologi modern, fasilitas olahraga yang lengkap, dan fasilitas seni seperti studio seni, ruang musik, dan teater. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk program pendidikan internasional memerlukan investasi besar, perencanaan matang, dan pemeliharaan yang baik, mencakup laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan seni.

Sejalan dengan pendapat di atas Permendikbud No. 31 Tahun 2014 Pasal 14 juga mensyaratkan fasilitas bagi sekolah berstandar internasional sebagai

berikut: (1) Sarana dan prasarana pada SPK memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar sarana dan prasarana yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh izin menteri, (2) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK, (3) Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK (4) Sarana dan prasarana dilengkapi dengan ruang multi media dan klinik.²²

2. Investasi dan Pendanaan

Investasi dan pendanaan bagi SPK harus dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat menjamin bahwa sekolah memiliki modal dan investasi yang kuat guna mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan operasional secara maksimal. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Yohan Rubiyantoro (Anggota Tim Verifikasi Sekolah Internasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tentang Pandangan yang disampaikan bersifat pribadi dalam berita *mapcomm.co.id* bahwa “Sebelum mengantongi izin, sekolah pun diharuskan menyerahkan surat referensi dari bank tentang jumlah simpanan mereka, atau pernyataan nilai aset sekolah. Hal ini untuk memastikan bahwa sekolah memiliki modal kuat untuk menyelenggarakan pendidikan. Sehingga, proses pembelajaran tidak terhenti di tengah jalan, yang berpotensi merugikan siswa dan orang tua.

SPK memerlukan investasi yang signifikan untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas. Sumber pendanaan yang berkelanjutan adalah salah satu tantangan utama. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) memerlukan investasi besar untuk memenuhi standar internasional, mencakup :

- a. **Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung:** Pembangunan gedung modern dengan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, serta perawatannya.

²² Hasdiana, “PERMENDIKBUD NOMOR 31 TAHUN 2014.”

- b. **Peralatan dan Teknologi:** Pembaruan peralatan laboratorium, komputer, dan teknologi pendidikan seperti perangkat keras dan lunak untuk e-learning.
- c. **Fasilitas Pendukung:** Investasi besar dalam koleksi perpustakaan, sistem katalog digital, dan fasilitas olahraga serta seni seperti lapangan olahraga, kolam renang, studio seni, ruang musik, dan teater.

Tantangan berikutnya dalam sumber pendanaan yang berkelanjutan yang menjadi tantangan utama, tantangan tersebut adalah :

- a. **Biaya Operasional:** Gaji kompetitif untuk guru berstandar internasional dan biaya pelatihan berkelanjutan.
- b. **Biaya Perawatan dan Pengembangan:** Pemeliharaan fasilitas dan pengembangan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
- c. **Sumber Pendanaan:** Pendanaan dari biaya pendidikan, dukungan pemerintah, sponsor, donasi, dan kerjasama dengan lembaga internasional, yang semuanya memiliki tantangan tersendiri dalam keberlanjutannya.

Investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan fasilitas SPK adalah esensial untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi sesuai standar internasional. Tantangan utama adalah memastikan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi pendanaan yang beragam dan kerjasama antara pemerintah, pihak sekolah, orang tua, dan pihak eksternal lainnya.

Tantangan Sosial dan Budaya

Integrasi Budaya

Untuk mendukung integrasi budaya lokal Indonesia dengan lingkungan internasional yang beragam di Unit Pendidikan Kerjasama (SPK), pendekatan inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal sangat penting.²³ Proses integrasi budaya yang kompleks ini mengharuskan memasukkan pelajaran budaya

²³ Yety Rochwulaningsih et al., "Integrating Socio-Cultural Value System into Health Services in Response to Covid-19 Patients' Self-Isolation in Indonesia," *Humanities and Social Sciences Communications* 10, no. 1 (2023): 162, <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01629-7>.

lokal ke dalam kurikulum, melatih guru dalam keragaman budaya, dan membangun lingkungan sekolah yang mencerminkan dan menghormati budaya Indonesia.²⁴ Integrasi budaya di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan inklusif dan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dengan menggabungkan pelajaran budaya lokal dalam kurikulum, melatih guru dalam keanekaragaman budaya, dan menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan dan menghormati budaya Indonesia, SPK dapat menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan bermanfaat bagi semua siswa.

Bahasa Pengantar

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam Sekolah Pendidikan Kerjasama (SPK) dapat menimbulkan tantangan bagi siswa dan guru. Berikut adalah beberapa bagian yang perlu dijelaskan dan diperinci : Tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam pengaturan pendidikan Indonesia (SPK) telah dipelajari secara ekstensif. Siswa dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas menghadapi kesulitan dalam memahami mata pelajaran, berkomunikasi secara efektif, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis.²⁵ Terlepas dari tantangan ini, sangat penting untuk terus mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya nasional dalam sistem pendidikan. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan menumbuhkan sentimen nasionalistik di kalangan siswa.²⁶ Dengan memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum, siswa dapat lebih memahami nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap warisan mereka.²⁷ Untuk mengatasi tantangan bahasa, SPK dapat mengembangkan

²⁴ Enkin Asrawijaya, "Harmonization Between Customs and Islam in the Jalawastu Community," *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 2 (2022): 378–98, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.378-398>.

²⁵ Heni Gerda Pesau et al., "The Role of Daily Spoken Language on the Performance of Language Tests: The Indonesian Experience," *Bilingualism: Language and Cognition* 26, no. 3 (2023): 538–49, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S136672892200075X>.

²⁶ Didin Nuruddin Hidayat et al., "Factors Impacting English Teachers' Creativity in Teaching English as a Foreign Language in Indonesia," *Studies in English Language and Education* 10, no. 1 (2023): 155–73, <https://doi.org/10.24815/siele.v10i1.26145>.

²⁷ Ni Komang Arie Suwastini, Putu Wiraningsih, and Kadek Eva Krisna Adnyani, "Representation of Gendered Language in English Textbook for Indonesian Junior High School,"

program pengembangan kemampuan berbahasa yang lebih baik, program ini dapat meliputi pelatihan bahasa Inggris, pelatihan bahasa Indonesia, dan pelatihan komunikasi interkultural. Program ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan lebih baik.

Satuan Pendidikan Kerjasama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam implementasinya. Tantangan-tantangan ini meliputi adaptasi kurikulum, kompetensi dan pelatihan guru, penyediaan fasilitas dan investasi, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, integrasi budaya dan bahasa, serta aksesibilitas dan kesenjangan ekonomi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPK, guru, orang tua, dan komunitas. Dengan demikian, SPK dapat menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan konteks lokal dan mempersiapkan siswa untuk berkompetisi di kancah global.

KESIMPULAN

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam upaya memenuhi standar pendidikan global sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai dan budaya lokal. Tantangan utama mencakup kebutuhan akan investasi signifikan dalam infrastruktur dan fasilitas, kesulitan dalam memastikan sumber pendanaan yang berkelanjutan, serta tuntutan untuk mengintegrasikan budaya lokal dengan lingkungan internasional yang beragam. Selain itu, regulasi yang dinamis dan sering berubah menambah lapisan kompleksitas yang dihadapi oleh sekolah-sekolah ini.

SBI harus mampu menyediakan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan fasilitas olahraga serta seni yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini memerlukan investasi besar dan pemeliharaan berkelanjutan yang tidak selalu mudah dicapai. Sumber pendanaan yang berkelanjutan menjadi tantangan kritis, dengan ketergantungan pada biaya pendidikan, dukungan pemerintah, sponsor, donasi, dan kerjasama internasional

yang seringkali tidak stabil. Integrasi budaya lokal Indonesia dengan lingkungan internasional yang beragam adalah aspek penting yang membutuhkan pendekatan inklusif dan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal. Ini termasuk menyesuaikan kurikulum, pelatihan guru, dan menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan dan menghormati budaya Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Asrawijaya, Enkin. "Harmonization Between Customs and Islam in the Jalawastu Community." *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 2 (2022): 378–98. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.378-398>.

Cheesman, Rosa, Nicolai T. Borgen, Torkild H. Lyngstad, Espen M. Eilertsen, Ziada Ayorech, Fartein A. Torvik, Ole A. Andreassen, Henrik D. Zachrisson, and Eivind Ystrom. "A Population-Wide Gene-Environment Interaction Study on How Genes, Schools, and Residential Areas Shape Achievement." *Npj Science of Learning* 7, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41539-022-00145-8>.

Cooper, Linda Z. "Methodology for a Project Examining Cognitive Categories for Library Information in Young Children." *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 53, no. 14 (December 1, 2002): 1223–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/asi.10164>.

Enggar Harussusilo, Yohanes. "Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia: Sekolah SPK Ambil Peran Strategis Di Kurikulum Merdeka," 2023.

Girault, Jean-Antoine. "Plea for a Simple But Radical Change in Scientific Publication: To Improve Openness, Reliability, and Reproducibility, Let's Deposit and Validate Our Results before Writing Articles." *Eneuro* 9, no. 5 (September 1, 2022): ENEURO.0318-22.2022. <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0318-22.2022>.

- Hasdiana, Ulva. "PERMENDIKBUD NOMOR 31 TAHUN 2014." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5.
- Hidayat, Didin Nuruddin, Fitriah, Mahlil, and Jon Mason. "Factors Impacting English Teachers' Creativity in Teaching English as a Foreign Language in Indonesia." *Studies in English Language and Education* 10, no. 1 (2023): 155–73. <https://doi.org/10.24815/siele.v10i1.26145>.
- Kurniawan, Wakib, Syarif Maulidin, and Miftahur Rohman. "Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Total Quality Manajemen." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 8, no. 1 (2024): 36–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/cakrawala.v8i1.1924>.
- Kurniawan, Wakib, Muhammad Latif Nawawi, Dedi Andrianto, and Siti Rohmaniah. "Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (Ctl) Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar Di Mi Lirboyo." *JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam)* 9, no. 1 (2023): 17–26. <https://doi.org/10.54892/jpgmi.v9i1.177>.
- Martin, Florence, Julie Bacak, Drew Polly, Weichao Wang, and Lynn Ahlgrim-Delzell. "Teacher and School Concerns and Actions on Elementary School Children Digital Safety." *TechTrends* 67, no. 3 (2023): 561–71. <https://doi.org/10.1007/s11528-022-00803-z>.
- Pesau, Heni Gerda, Aria Saloka Immanuel, Augustina Sulastri, and Gilles van Luitelaar. "The Role of Daily Spoken Language on the Performance of Language Tests: The Indonesian Experience." *Bilingualism: Language and Cognition* 26, no. 3 (2023): 538–49. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S136672892200075X>.
- Rahayu, S, E Haryanto, and M R Ali. "Manajemen Kurikulum Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Sekolah Dasar High Scope Indonesia Kota Palembang." *Educational ...* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/20.21595/elementv99i1.paperID>.

Rochwulaningsih, Yety, Singgih Tri Sulistiyono, Mahendra Puji Utama, Noor Naelil Masruroh, Fanada Sholihah, and Fajar Gemilang Purna Yudha. "Integrating Socio-Cultural Value System into Health Services in Response to Covid-19 Patients' Self-Isolation in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Communications* 10, no. 1 (2023): 162. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01629-7>.

Rofiqoh, Ifah, and Zulhawati Zulhawati. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan Campuran." *Pustaka Pelajar*, no. 1 (2020): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Suwastini, Ni Komang Arie, Putu Wiraningsih, and Kadek Eva Krisna Adnyani. "Representation of Gendered Language in English Textbook for Indonesian Junior High School." *International Journal of Language Education* 7, no. 1 (2023): 94–119. <https://doi.org/10.26858/ijole.v1i1.37632>.

Trajectories, Developmental, Parent Behavior, Academic Achievement, Lisa Bardach, Takuya Yanagida, Thomas Goetz, Hayley Jach, Reinhard Pekrun, and United Kingdom. "Self- and Externally Regulated Learning in Adolescence Self- and Externally Regulated Learning in Adolescence" 59, no. 7 (2024): 1327–1345. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/dev0001537>.

Vargas-Montoya, Luis, Gregorio Gimenez, and Marcos Fernández-Gutiérrez. "ICT Use for Learning and Students' Outcomes: Does the Country's Development Level Matter?" *Socio-Economic Planning Sciences* 87 (2023): 101550. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101550>.

Yana, Hawwin Huda, Dedi Andrianto, Muhammad Latif Nawawi, and Wahyu Sudrajat. "MODERATED COEXISTENCE : EXPLORING RELIGIOUS TENSIONS THROUGH." *RAUDHAH Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, no. April (2024): 68–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.48094/raudhah.v9i1.605>.

Yana, Hawwin Huda, and Lilik Susanti. "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi Di Madrasah." *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i1.47>.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Zhou, Ziyu, Steve Graham, and Tien Ping Hsiang. "Teaching Chinese Characters to First and Second Graders during the First Covid-19 School Closure in China: An Observational Study." *Reading and Writing* 36, no. 9 (2023): 2465–98.
<https://doi.org/10.1007/s11145-022-10398-9>.